

**KAJIAN HUKUM LEGALITAS PROGRAM PEREMAJAAN KELAPA
SAWIT PERIHAL KELENGKAPAN DAN KEBENARAN DOKUMEN
PENGUSULAN YANG DIATUR PERMEN NO.19 TAHUN 2023
PERUBAHAN ATAS PERMEN NO.3 TAHUN 2022**

ABSTRAK

Hans Ivander Antonio

223309030010

Peremajaan kelapa sawit merupakan program penting Pemerintah dan Negara bagi masyarakat petani kelapa sawit. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat beragam permasalahan yang tidak sesuai dengan sasaran program tersebut. Permasalahan: Bagaimana jika kelengkapan dokumen pengusul tidak dapat dipenuhi oleh pihak pengusul?; Apa kendala pengusul dalam melengkapi kelengkapan dan kebenaran dokumen pengusulan?; Bagaimana solusi yang diberikan pemerintah dalam hal ini Kementeria Pertanian bagi pengusul dalam melengkapi dan kebenaran dokumen pengusul? Tujuan penelitian Agar peneliti yang sebagai pelaku usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dan juga petani di sekitar peneliti dapat mengetahui program dan mengambil keuntungan yang sudah diberikan Negara kepada masyarakat untuk diperuntukkan sebesar-besarnya pada bidang yang dikonsentrasi dari program peremajaan kelapa sawit ini; Ketika Pemerintah sudah mengetahui bahwasanya banyak masyarakat yang tidak tersosialisasi dengan baik diharapkan Pemerintah untuk melakukan upaya untuk memperbaiki cara sosialisasinya dan kembali melakukan audit terhadap kebenaran dari dana yang sudah berhasil dicairkan kepada para peserta sebelumnya untuk mengecek apakah itu merupakan penyaluran dana yang disalurkan kepada peserta-peserta fiktif; dan untuk meminimalisir terjadinya transaksi yang merugikan dan bersifat kolusi, korupsi dan nepotisme. Hasil penelitian: *Pertama*, Pengusul diberikan kesempatan oleh kepala dinas kabupaten/ kota untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan dokumen; *Kedua*, Kendala upaya melengkapi sertifikat kepemilikan ini karena, terkadang akses mereka berada jauh dari instansi pemerintahan terkait untuk mengurus langkah melengkapi legalitas lahan tersebut serta ketidaklengkapan data awal miliknya akibat kekurangan pemahaman dan pengetahuan bahwa, ketidaklengkapan itu dapat ditanggulangi dengan surat keterangan kepala desa yang memiliki kekuatan hukum serupa; dan *Ketiga*, Solusi yang diberikan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian bagi pengusul dalam melengkapi dan kebenaran dokumen adalah dengan jalan memberikan waktu bagi pengusul guna melengkapi permasalahan dokumen kepemilikan.

Kata kunci: Kelapa Sawit, Peremajaan Kelapa Sawit, Program Sosialisasi dan Legalitas